



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**NOMOR 44 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia)
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia)
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
29. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
30. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 1 Januari 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 122 Seri A);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 7 Oktober 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 164)

**Dengan Pesetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
dan  
BUPATI GUNUNG MAS**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2011

**Pasal 1**

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan realisasi anggaran
  - b. Neraca
  - c. Laporan arus kas; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2011 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	533,076,340,963.52		
b. Belanja	Rp	544,904,466,749.26		
Surplus/defisit			Rp	(11,828,125,785.74)
c. Pembiayaan				
Penerimaan pembiayaan	Rp	64,079,327,251.99		
Pengeluaran pembiayaan	Rp	3,388,279,635.00		
Surplus/defisit			Rp	60,691,047,616.99

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 3.970.004.550,52 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	529,087,272,467.00
b. Realisasi	Rp	533,076,340,963.52
Selisih lebih/(kurang)	Rp	3,989,068,496.52
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.44.228.254.457,84) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	589,132,721,207.10
b. Realisasi	Rp	544,904,466,749.26
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(44,228,254,457.84)
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.48.198.259.008,36 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(60,045,448,740.10)
b. Realisasi	Rp	(11,828,125,785.74)
Selisih lebih/(kurang)	Rp	48,217,322,954.36
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.57.942.457,89 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	64,040,448,740.10
b. Realisasi	Rp	64,079,327,251.99
Selisih lebih/(kurang)	Rp	38,878,511.89
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp. 664.720.365,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	3,995,000,000.00
b. Realisasi	Rp	3,388,279,635.00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(606,720,365.00)
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 664.662.882,89 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	60,045,448,740.10
b. Realisasi	Rp	60,691,047,616.99
Selisih lebih/(kurang)	Rp	645,598,876.89

### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

- |                     |    |                      |
|---------------------|----|----------------------|
| a. Jumlah aset      | Rp | 1,399,144,852,125.92 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp | 144,700,711.19       |
| c. Jumlah ekuitas   | Rp | 1,399,000,151,414.73 |

### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

- |   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2011            | Rp | 63,768,939,289.29    |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi                    | Rp | 191,757,691,808.64   |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan | Rp | (203,585,817,594.38) |
| d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan                 | Rp | (3,246,034,605.11)   |
| e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran                | Rp | 168,861,249.00       |
| f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2011         | Rp | 48,863,640,147.44    |

### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d tahun anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- |               |   |
|---------------|---|
| a. Lampiran 1 | Laporan realisasi anggaran;   |
| Lampiran 1.1  | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; |

Lampiran I.2	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
Lampiran I.5	Daftar piutang daerah;
Lampiran I.6	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya;
Lampiran I.7	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
Lampiran I.8	Daftar Penyertaan Modal
Lampiran I.9	Daftar Kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun ini
Lampiran I.10	Daftar Dana Cadangan
Lampiran I.11	Daftar Pinjaman Daerah
b. Lampiran II	Neraca
c. Lampiran III	Laporan arus kas
d. Lampiran IV	Catatan atas laporan keuangan

#### **Pasal 8**

Bupati menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 15 Agustus 2012

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**HAMBIT BINTIH**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 15 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**Ir. KAMIAR**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19571021 198903 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 196 TAHUN 2012